



**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Papua Barat**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2014**

**Nomor: LAKIP-01/PW27/G/2015
Tanggal: 02 Januari 2015**

Keamatan Waiyag, Raja Ampat

Ringkasan Eksekutif

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat yang sebelumnya wilayah kerjanya berada/merupakan bagian dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor : KEP-1252/PW26/1/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan. Dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam tahun 2012-2013 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 11 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menjadi Perwakilan Mandiri *Type B*.

Visi Perwakilan BPKP adalah "Menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas". Sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP berperan membantu Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. (2) membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi

Papua Barat serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan 6 (enam) tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah merumuskan 8 (delapan) sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/3293/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 30 November 2013 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa *outcome* dan *output* serta penetapan IKU Dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2014. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kualitatif dan kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Tahun 2014 adalah tahun terakhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2014 (secara mandiri dimulai tahun 2012). Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010, dilakukan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran tujuan strategis didasarkan capaian indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil penilaian atas Pelaksanaan Kinerja Tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 6 (enam) Tujuan Strategis dan 8 (delapan) Sasaran Strategis BPKP telah tercapai, dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1.
Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Capaian (%)	Sasaran	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara	148,16	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 90% LKPD	162,98
			Sasaran 1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 75%	133,33
2	Meningkatnya Tata Kepemerintahan yang Baik	174,25	Sasaran 2.1 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300% IPD dan Terselenggaranya <i>Good Governance</i> pada 65% BUMN/BUMD	174,25
3	Tercapainya Iklim yang dapat Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara	128,57	Sasaran 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	128,57
4	Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	125,00	Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L/Pemda 60%	125,00
5	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten	115,28	Sasaran 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda	125,00
			Sasaran 5.2 Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%	105,56
6	Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang handal bagi Presiden/Pemerintah	110,00	Sasaran 6.1 Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan	110,00

Keberhasilan capaian tujuan dan sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Pengukuran capaian kinerja 6 (enam) tujuan dan 8 (delapan) sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 11 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU Dominan) dari 33 IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2012-2014 dan Tapkin BPKP Tahun 2014. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Tujuan 1: “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara”.

Capaian tujuan 1 (satu) sebesar 148,16%, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian 2 (dua) IKU Dominan dengan realisasi, yaitu:

- a. “Jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan” sebanyak 21 Instansi dari 11 Instansi target dalam Tapkin Revisi atau mencapai 200,96% dari target Tapkin Revisi 95%.
- b. “Jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh Opini Minimal WTP/WDP” sebanyak 9 dari 12 Pemda yang diasistensi oleh BPKP atau mencapai 125% dari target Tapkin Revisi 60%.

- 2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75%.

Capaian Sasaran Strategis ini ditunjukkan oleh capaian IKU Dominan “persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” yang diukur dari jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) sebanyak 5 (lima) tindak lanjut dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD sebanyak 5 (lima) rekomendasi atau mencapai 133,33% dari target Tapkin Revisi 75%.

2. Tujuan 2: “Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik”.

Capaian tujuan 2 (dua) sebesar 174,25% dengan sasaran strategis “Terselenggaranya SPM pada 300% IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD”. Capaian sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian 2 (dua) IKU Dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Untuk IKU “Persentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal”, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melakukan audit kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas 2 (dua) IPD untuk mendorong seluruh Pemda di Provinsi Papua Barat mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan dengan capaian IKU sebesar 166,67% dari target Tapkin Revisi sebesar 60%.
- b. Untuk IKU “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja” Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melakukan audit kinerja pada 2 (dua) BUMD dari yang ditargetkan dalam Tapkin 2 (dua) BUMD atau 100% mencapai 181,82% dari target Tapkin Revisi sebesar 55%.

3. Tujuan 3: “Tercapainya Iklim yang Dapat Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara”.

Capaian Tujuan 3 (tiga) sebesar 128,57% dengan sasaran strategis “Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%”.

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU Dominan “Kelompok Masyarakat/Laporan yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”, yang diukur berdasarkan jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan realisasi sebanyak 9 (sembilan) kelompok masyarakat/laporan, dengan capaian sebesar 100% atas target Tapkin Revisi 1 (satu) kelompok/laporan.

4. Tujuan 4: “Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Capaian Tujuan 4 (empat) sebesar 125% dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda”.

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU Dominan “Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”, dengan cakupan sebanyak 12 (dua belas) Pemda yang ada di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2014. Dari 12 (dua belas) Pemda tersebut seluruhnya telah menyusun Perkada tentang SPIP. Penyelenggaraan SPIP yang sudah dilakukan *Diagnostic Assessment* sebanyak 5 (lima) Pemda, 5 (lima) Pemda telah melakukan Monitoring Perbaikan dan sebanyak 7 (tujuh) Pemda telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengukur berdasarkan jumlah Pemda yang mendapat penilaian minimal Opini LK WDP sebanyak 9 (sembilan) Pemda dari 12 (dua belas) Pemda yang diasistensi dengan realisasi 75%, dengan capaian 125% dari target Tapkin Revisi sebesar 60%.

5. Tujuan 5: “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Capaian sebesar 115,28% dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda” dan “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%”.

6. Tujuan 6: “Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang handal bagi Presiden/Pemerintah”.

Capaian tujuan strategis 6 (enam) sebesar 110% dengan sasaran strategis “Terselenggaranya 1 Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan”.

Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh capaian IKU Dominan, “Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan secara Efektif” diukur dengan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPD, DMS dan SIMPEG).

Realisasi IKU tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) Aplikasi Sistem Informasi yang dimanfaatkan atau mencapai 110,00% dari target sebanyak 10 (sepuluh) sistem informasi yang dimanfaatkan.

Hasil Penilaian Sistem AKIP yang dilakukan secara mandiri pada akhir Desember 2014 menunjukkan skor/nilai **92,33** yang masuk pada kategori **“AA / MEMUASKAN”**. Rincian Lembar Kriteria Evaluasi AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berdasarkan komponen/sub komponen lihat **lampiran 9**.

Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada Tahun 2014 menggunakan dana DIPA Revisi sebesar Rp12.319.604.000,00 atau 97,18% dari anggaran sebesar Rp12.677.100.000,00 dan Dana Mitra Kerja sebesar Rp3.675.856.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 17.455 OH/HP atau 113,93% dari rencana sebanyak 15.321 OH/HP.

Secara umum capaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2014 telah tercapai 100% dibandingkan dengan target dalam Renstra 2012-2014 dan Tapkin 2014.

Namun demikian tetap diperlukan upaya kerja...kerja...dan kerja lebih keras lagi untuk mengoptimalkan dan mempertahankan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam upaya memperbaiki kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala metode bimbingan teknis/asistensi penyusunan laporan keuangan kepada pemerintah daerah;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60/2008 pada Pemerintah Daerah, dengan cara:
 - 1) Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP dengan terus melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan tersebut adalah:
 - a) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang fokus untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
 - b) Meningkatkan kegiatan sosialisasi, diklat dan *workshop* penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c) Meningkatkan intensitas bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan mendorong penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan

(pemahaman dan pemetaan), pelaksanaan (penilaian risiko, pembangunan infrastruktur dan internalisasi) dan pengembangan berkelanjutan.

- 2) Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda dalam percepatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral pada kegiatan operasional instansi.
3. Berusaha meningkatkan kinerja dan kualitas output BPKP dengan memegang teguh "PIONIR" dan 5-AS.
4. Perbaiki jaringan LAN dan mengadakan PPM penerapan aplikasi SKI dan IPMS.

Manokwari, 2 Januari 2015

Kepala Perwakilan,



Sumitro

Sumitro

NIP. 19621020 198302 1001